



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amos, H.F. Abraham, 2004, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis & Empirisme*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ardiwilaga, Roestandi, 1962, *Hukum Agraria Indonesia*, N.V. Masa Baru, Bandung.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chomzah, Ali Achmad, 2003, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Fauzi, Noer, 1999, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Cetakan I, Insist bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Food and Agriculture Organization, 2015, *The Director-General's Medium Term Plan 2014-17 and Programme of Work and Budget 2014-15*, FAO, Rome.
- Haar, Ter, 1976, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terj: K.Ng. Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta.
- Hatta, Mohammad, 2002, *Bung Hatta Menjawab*, PT. Gunung Agung Tbk., Jakarta.
- Hodgson, Stephen, 2016, *Exploring the Concept of Water Tenure*, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Roma.
- Kementrian Pertanian Republik Indonesia 2017, *Statistik Pertanian 2017*, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Jakarta.
- Koesnoe, Moh., 1979, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislator ke Positive Legislator*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Mazmanian, Daniel A. and Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.



- Mcloed, Ian, 1999, *Legal Method, Palgrave Macmillan Law Masters*, London.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi I, Yogyakarta, Liberty.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Jakarta.
- Nandy, Ashis, 1983, *The Intimate Enemy, Loss, and Recovery of Self Under Colonialism*, Oxford University Press, Delhi.
- Narayan, Deepa, 2002, *Empowerment and Poverty Reduction*, The World Bank, Washinton D.C..
- Nurlinda, Ida, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Hukum Agraria: Perspektif Hukum*, Rajawali Press, Yogyakarta.
- Ostrom, Elinor dan Roy Gardner, 1994, *Rules, Games, and Common Pool Resources*, Michigan Press, United State.
- Parlindungan, Adi Putra, 1991, *Komentar atas Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Priyono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka, 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta
- Ruchiyat, Eddy, 2006, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Reformasi*, Bandung, PT. Alumni.
- Ruwiastuti, Maria Rita, *et. al.*, 1997, *Penghancuran Hak Masyarakat Adat atas Tanah: Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat dan Hukum Agraria*, Bandung, KPA bekerjasama dengan INPI-PACT.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Press.
- Santiago, Charles, 2003, *Manufacturing Water Insecurity, The Challenge to Asian water Security*, The Southeast Asia Council for Food Security and Fair Trade (SEACON), Selangor.
- Silalahi, Daud, 1996, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.



- Soepomo, 1970, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,
- Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Cetakan V, Liberty, Yogyakarta.
- Sudjito, 2014, *Ilmu Hukum Holistik: Studi untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria, 2001, *Transitional Justice atas Hak Sumber Daya Alam*, dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Keadilan dalam Masa Transisi, Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Varley, Robert, C.G., 1993, *Masalah dan Kebijakan Irigasi: Pengalaman Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Zakaria, Wan Abbas, 1992, *Analisis Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Irigasi Pompa Dalam*, Program PascaSarjana Institut Pertanian Bogor.

## **B. Jurnal**

- Arrsa, Ria Casmi, "Telaah Sociolegal Terhadap Terwujudnya Kedaulatan Hak Atas Sumber Daya Air", *Jurnal Rechtvinding*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2015.
- Chandranegara, Ibnu Sina, "Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia", *Jurnal Rechtvinding*, Vol. 5, No. 3, Desember 2016.
- Hasibuan, Ali Marwan dan Hisar P. Butar Butar, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air", *Jurnal Legislasi*, Vol. 13, No. 4, Desember 2016.
- Listyawaty, Hery dan Triyanto Suharsono, 2012, "Pengawasan dan Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi di Kabupaten Sleman", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, Februari 2012.
- Pasandaran, Effendi, "Menyoroti Sejarah Perkembangan Undang-Undang Tentang Air Pengairan dan Sumber Daya Air (Assessing Development History of Law on Irrigation Water and Water Resources)", *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 33, No. 1, Juli 2015.
- Pasandaran, Effendi, "Politik Ekonomi Reformasi Irigasi di Indonesia: Tinjauan Kritis terhadap RUU Sumber Daya Air", *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 1, No. 4, Desember 2003.



Pasandaran, Effendi, “Reformasi Irigasi dalam Kerangka Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air”, *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 3, No. 3, September 2005.

Rahmatunnisa, Mudiwati, “Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Pada Era Reformasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2015.

Revesteijn, Wim, “Dutch Engineering Overseas: The Creation of A Modern Irrigation System in Colonial Java”, *Journal of Knowledge, Technology, and Policy*, Vol. 14, No. 14, December 2002.

Rosegrant, M. W. and Effendi Pasandaran, “Determinant of public investment: irrigation in Indonesia”, *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 14, No. 2, September 2016.

Sulistiowati, “Penerapan Prinsip Lisensi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3, Oktober 2012.

Syahyuti, “Pemahaman terhadap Petani Kecil sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian”, *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 31, No. 1, Juli 2013.

Tobroni, Faiq, “Mengkritisi HP-3 Perspektif Konstitusi dan Pemberdayaan Rakyat (Kontribusi Teori Sosiologi Membaca Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, Mei 2012.

Yurista, Ananda Prima Yurista, “Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, *Jurnal Rechtvinding*, Vol. 5, No. 3, Desember 2016.

Zakie, Mukmin, “Konsepsi Hak Menguasai Negara Oleh Negara Atas Sumber Daya Agraria”, *Jurnal Hukum*, Vol. 29, No. 12, Mei 2005.

### **C. Hasil Penelitian dan Tugas Akhir**

Junaedi, Aziz, 2005, *Perlindungan Hukum bagi Petani atas Akses Terkait Penyelenggaraan Modifikasi Cuaca oleh Swasta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013*, Skripsi, Program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Laely, Nur, 2018, *Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda in Onderafdeling Bonthain 1905-1942*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Makassar.

Nugroho, Heru, 2005, *Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Bantul*, Skripsi, Program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



Tirta, Tyson, 2012, *Meneliti Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Jawa: Mindere Walvaart Commisie, 1902-1914*, Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Jakarta.

Titahelu, Ronald Z., 2004, *Penetapan Azas-Azas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat*, Desertasi, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

#### **D. Makalah dan Pidato**

Kuntowijoyo, "Masalah Tanah dan Runtuhnya Mitos Negara Budiman", *Makalah*, Yogyakarta, 1992.

Manan, Bagir, "Beberapa Catatan atas RUU tentang MIGAS", *Makalah*, Diskusi Panel RUU Migas Universitas Padjajaran, Bandung, 1999.

Sumardjono, Maria, 1998, "Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara", *Makalah*, Seminar Metodologi Penelitian bagi Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 12 April, Yogyakarta

#### **E. Artikel dalam Antologi dengan Editor**

Asnawi, Sjojfan, "Strategi Investasi Irigasi dan Swasembada Pangan", di dalam Effendi Pasandaran (ed), 1991, *Irigasi di Indonesia : Strategi dan Pengembangan*, Pustaka LP3ES, Jakarta.

Boeke, J. H., "Objective and Personal Elements in Colonial Welfare Policy", dalam Van Hove (ed.), 1966, *Indonesian Economics: The Concepts of Dualism Theory and Practice*, Den Haag.

Booth, Anne, "Tinjauan Sejarah Perkembangan, Kelembagaan dan Ekonomi", dalam Effendi Pasandaran dan Donald C. Taylor (eds.), 1988, *Irigasi: Kelembagaan dan Ekonomi*, PT. Gramedia, Jakarta.

Lubis, Sofyan dan Arselan Harahap, "Mencari Konsep Pendekatan Partisipasi: Kasus Pembangunan Irigasi di Indonesia", dalam John Ambler (ed), 1992, *Irigasi di Indonesia: Dinamika Kelembagaan Petani*, Pustaka LP3ES, Jakarta.

Naim, Mochtar dan Sjojfan Asnawi, 1995, "Aspek Kelembagaan Pembangunan Irigasi: Sebuah Pendekatan Holistik Terpadu", dalam: Suzanne E. Siskel dan S.R. Hutapea (eds.), *Irigasi di Indonesia: Peran Masyarakat dan Penelitian*, Pustaka LP3ES, Jakarta.



- Ostrom, Elinor dan Charlotte Hess, “Private and Common Property Rights”, di dalam Boudewijn Bouckkaert (ed), 2010, *Property Law and Economics*, Edward Elgar Publishing.
- Pakpahan, Agus, 1991, “Kerangka Analisis Kebijakan Pengembangan Daerah Aliran Sungai Bagian Hulu”, dalam Effendi Pasandaran (ed.), 1992, *Irigasi di Indonesia: Strategi dan Pengembangan*, Jakarta, LP3ES.
- Pasandaran, Effendi, “Pokok-pokok pemikiran tentang kebijakan investasi di bidang pengairan”, dalam: S.P. Nugroho, S. Adi, dan B. Setiadi (eds.), 2002, *Peluang dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia*, P3-TPSLK BPPT dan HSF., Jakarta.
- Pasandaran, Effendi, “Politik Ekonomi Sumber Daya Lahan dan Air, Effendi Pasandaran”, dalam Bambang Sayaka, dan Tri Pranadji (eds.), 2006, *Pengelolaan Lahan dan Air di Indonesia*, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Ravesteijn, Wim, “Learning the Art: The Dutch Contribution to Irrigation in Indonesia”, dalam J.J. Kop dan W. Ravesteijn (eds.), 2015, *Irrigation Revisited: An Anthology of Indonesian-Dutch Cooperation 1964-2014*, Eburon, Jakarta.
- Soenarno, “Pembangunan Pengairan Khususnya Irigasi pada PJP I dan Prospeknya pada PJP II”, dalam: Suzanne E. Siskel dan S.R. Hutapea (eds.), 1995, *Irigasi di Indonesia: Peran Masyarakat dan Penelitian*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Sugianto, Tjahjadi, 1995, “Peranan Penelitian Sosial Ekonomi dalam Pembangunan Irigasi”, dalam Suzanne E. Siskel dan S.R. Hutapea (eds.), *Irigasi di Indonesia: Peran Masyarakat dan Penelitian*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Sumedi dan Achmad Djauhari, “Refomasi Kebijakan Desentralisasi Sektor Pertanian”, dalam Haryono, Effendi Pasandaran, Muchjidin Rachmat, Sudi Mardianto, Sumedi Handewi, P. Salim, dan Agung Heriadi, (eds.), 2014, *Refomasi Kebijakan Menuju Transformasi Pembangunan Pertanian*, IAARD Press, Jakarta.
- Tambunan, B.S. dan Bachtiar Harun, “Iuran Pelayanan Jasa Irigasi”, di dalam Effendi Pasandaran (ed), 1991, *Irigasi di Indonesia : Strategi dan Pengembangan*, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Teeuwen, H.H.A., “The Role of the Legal Framework in Implementing Water Resources Development Projects during the Second Part of the 20th Century”, dalam J.J. Kop dan W. Ravesteijn (eds.), 2015, *Irrigation Revisited: An Anthology of Indonesian-Dutch Cooperation 1964-2014*, Eburon, Jakarta



## **F. Internet**

Aditiasari, Dana, “Fakta di Balik Swasembada Pangan Era Orde Baru (2)”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4314545/fakta-di-balik-swasembada-pangan-era-orde-baru-2>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Sosialisasi Peraturan Bidang Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, <http://sda.pu.go.id/old/sda/post/100514/sosialisasi-peraturan-bidang-sumber-daya-air.html>, diakses pada tanggal 6 Januari 2018.

Febriyani, Chodijah, “Kadin: Sektor Pertanian Paling Besar Menyerap Tenaga Kerja”, <http://www.industry.co.id/read/27532/kadin-sektor-pertanian-paling-besar-menyerap-tenaga-kerja>, diakses tanggal 6 Desember 2018.

Maryati, “Sektor Pertanian Paling Banyak Serap Tenaga Kerja”, <https://www.antaranews.com/berita/627616/sektor-pertanian-paling-banyak-serap-tenaga-kerja>, diakses tanggal 6 Desember 2018.

## **G. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Agrarische Besluit (Staatblad 1870 Nomor 118)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatblad Tahun 1874 Nomor 23)

Algemeen Water Reglement 1936 (Staatblad Tahun 1936 Nomor 489)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3189)



- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225)
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226)
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156).
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624)
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802)
- Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801)
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 19)
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 535)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640)



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 perihal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 13 Juli 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-III/2005 perihal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 13 Juli 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 16 Juni 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 perihal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 17 September 2015

#### **H. Lain-lain**

Gruyter, De P. 1933. Plant en water regelingen. De Waterstaat Ingenieur No. 1.

Hasselman, C.J. 1914. Algemeen overzicht van de uitkomsten van het welvaart onderzoek gehouden op Java en Madoera. S'gravenhage Martinus Nijhofi.

Van der Gessen, C., 1946. Bevloeiing van Rijst op Java en Madoera. (Irrigation of rice in Java and Madura). Landbouw Batavia, Java. XIX:99-121.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.